

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) KOALISI  
PEREMPUAN INDONESIA (KPI) KOTA SEMARANG DALAM  
PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG

Oleh: CANDRA SITORUS (14010110120004)  
Jurusan Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Web : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Posisi perempuan yang selama ini cenderung menjadi objek dari pada subjek dalam pembangunan nasional merupakan hal yang dirasa tidak adil bagi perempuan. Ruang gerak mereka dibatasi dalam wilayah domestik, mereka tidak diberi ruang untuk berperan dan berpartisipasi dalam wilayah publik apalagi berperan dan berpartisipasi dalam wilayah berorganisasi ataupun politik praktis dan bahkan cenderung diabaikan atau bahkan dipinggirkan. Sesungguhnya ide normatif UUD 1945 tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena terdapat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan UU Politik dan Pemilu secara jelas mengakomodir perempuan untuk bisa berperan dan berpartisipasi lebih luas lagi. Tidak hanya dalam wilayah domestik tetapi mereka diberi ruang untuk bisa berperan dan berpartisipasi dalam wilayah publik dalam hal ini berperan dan berpartisipasi dalam dunia organisasi dan politik praktis. Karena UU mengharuskan 30% kepengurusan partai politik dan calon wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif adalah perempuan termasuk juga dalam pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Program – program apa saja yang dilakukan KPI di kota Semarang untuk mendukung pemberdayaan perempuan. 2) Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh KPI Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif. Peneliti berupaya untuk menggambarkan secara kualitatif peran LSM KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI) Kota Semarang dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik berupa kata-kata atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Peran KPI Kota Semarang dalam memberdayakan perempuan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk bergabung mengembangkan kemandirian. Disini peran KPI Kota Semarang

adalah wadah untuk belajar dan motivator bagi para perempuan untuk mengetahui cara berorganisasi dan berpolitik. 2).Faktor pendukung program pemberdayaan perempuan KPI Semarang: Kerja sama antara pengurus LSM dan masyarakat sasaran, serta adanya dukungan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, NGO dan pihak swasta lainnya. b. Faktor penghambat: 1).Faktor penghambat yang berasal dari kelompok sasaran program adalah: kurangnya kesadaran dan kemauan untuk menerapkan pengetahuan tentang berorganisasi dan mengenal dunia politik. 2)Faktor penghambat yang berasal dari eksternal: masih tingginya budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan banyak dari perempuan yang terlibat menjadi aktivis dan memperjuangkan hak-hak mereka, mereka masih cenderung bergantung pada kemampuan kaum laki-laki.

**Kata Kunci: NGO, KPI, Patriarki, Pemberdayaan Perempuan**

### **ABSTRACT**

*The position of women who have tended to become the object of national development is unfair for women. Their space is limited in the domestic region, they are not given space to contribute and participate in public areas, moreover contribute and participate in the region to organize or even practical politics tend to be ignored or even marginalized. Indeed in statute of Indonesia 1945 was never discriminate between men and women, because there are values of justice and equality for men and women, even Political and Electoral Law clearly accommodate women could contribute and participate. The women will be participate not only in domestic areas but they are given space to be able to contribute and participate in public areas in this role and participate in the world of organization and practical politics. Because the law requires that 30% of the management of political party and candidate representatives in the legislature are women as well as in government.*

*This study aims to determine: 1) To know the programs of KPI in Semarang city to support women's empowerment. 2) To determine factors of supporting and inhibiting the implementation of women's empowerment program implemented by KPI in Semarang. In this research use descriptive qualitative study. The aim using qualitative-descriptive methods to describe the role of NGO Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) of Semarang in supporting the realization of public disclosure in the form of words or discourse through a proper and systematic interpretation.*

*The results showed: 1) The role of KPI Semarang in empowering women through NGOs carried out through training and mentoring for joining develop independence. In here, the role of KPI Semarang are gathering to learn and motivator for women to know how to organize and politics. 2) Supporting factors in women's empowerment program KPI of Semarang: Cooperation between*

*NGOs and public officials, as well as the support of stakeholders such as governments, NGOs and other private organizations. Inhibiting factors: a) Inhibiting factors are derived from the group is: the lack of awareness and willingness to apply knowledge of the organization and get to know the world of politics. Inhibiting factors from the external: The patriarchal culture is still high in Indonesia resulted in a lot of women are afraid of joining an activist and fight for their rights, they still tend to rely on the ability of men.*

**Keywords: NGOs, KPI, Patriarchy, Women's Empowerment**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan bertahap secara terus-menerus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan, peran perempuan merupakan bagian tak terpisahkan khususnya dalam lingkungan sosial atau masyarakat, tak terkecuali dalam masyarakat miskin. Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Kaum pria sudah sejak lama mendominasi arena ruang publik politik. Mereka menformulasi aturan main dan mereka juga mendefinisikan standar evaluasi dalam medan arena politik tersebut.<sup>1</sup> Keberadaan model politik/ institusi/ perilaku yang diformulasi sekaligus didominasi oleh kaum pria menyebabkan kaum perempuan menolak budaya politik bergaya pria. Dewasa ini, lebih dari 95 persen negara – negara di dunia menjamin dua hak demokrasi yang paling dasar bagi kaum perempuan, yakni: *right to vote* dan *right to stand for elections*. Menurut teori, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk menjadi kandidat, dan melakukan pemilihan, didasarkan pada hak pilih, *right to vote*. Namun dalam kenyataannya hak pilih perempuan dibatasi karena pada dasarnya hanya calon pria yang umumnya mempunyai hak pilih.<sup>2</sup> Hal ini tidak hanya terjadi pada model demokrasi yang baru (demokrasi di negara – negara sedang berkembang) tetapi juga berlangsung pada model demokrasi yang mapan.

Salah satu tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan mengeluarkan regulasi tentang kesetaraan gender yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Dalam Konstitusi, Pasal 28 I (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991, hlm.69.

<sup>2</sup> Mansoer Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm.59.

*mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,”* serta diperkuat juga melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) ke dalam UU NO.7 tahun 1984.

Hal ini berarti bahwa secara filosofis, Indonesia menjamin dan melindungi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif tanpa membedakan status sosial, ras, suku, budaya, agama, maupun jenis kelamin. Karena tindakan diskriminatif yang menyebabkan penguasaan dan dominasi terhadap salah satu kelompok warga tertentu merupakan sikap yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.<sup>3</sup>

Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga–lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim, mengakibatkan keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan, meskipun menurut data BPS tahun 2000 jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki–laki berkisar 52% : 48%.

Kota Semarang sendiri memiliki jumlah Penduduk yang dapat dikatakan tidak sedikit dari kota-kota lain di Indonesia yang berjumlah 1.434.025 orang yang terdiri dari 711.761 orang laki-laki dan 722.264 orang perempuan. Meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak, namun perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pemilu tahun 2009 hanya berjumlah 6 (enam) orang. Kenyataan itu tidak dapat dipisahkan dari *image* dan konstruksi sosial yang berkembang dan dipahami masyarakat Semarang. *Image* yang berkembang dalam masyarakat bahwa ‘perempuan tidak layak terjun dalam dunia politik’. Perempuan tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya.<sup>4</sup> *Image* dan konstruksi sosial tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi dan berdampak pada terjadinya ketimpangan gender.

Fenomena diatas membawa tugas yang berat bagi para aktivis perempuan dalam melakukan pemberdayaan terhadap komunitasnya, karena sedikit demi sedikit harus mampu merobohkan kontruksi sosial berupa mitos, citra, prasangka dan pelabelan-pelabelan yang negatif, merugikan serta melemahkan terhadap keberadaan perempuan (Gender sensitivity). Sebuah perjuangan dan pengorbanan yang secara komprehensif harus dilakukan dengan terus menerus dan berkelanjutan oleh para perempuan dan elemen masyarakat lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suharto, Merajut Demokrasi: *Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara Kencana, 2005, hlm. 127.

<sup>4</sup> Budi Lazarusli dalam Etika, *Politik dan Demokrasi: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Salatiga : Percik, 2006, hlm.9.

<sup>5</sup> Pramudianto, *Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jurnal Madani vol.2 No. 3 tahun 1999, hlm.18.

LSM sendiri muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pembangunan. Bila demikian halnya LSM memungkinkan tumbuhnya kesadaran nilai asasi manusia yang didudukkan sejajar dengan proses pembangunan. Sementara itu kedekatan LSM menjadi kekuatan sosial politik yang memungkinkan proses pembangunan berkelanjutan dalam proporsi yang seharusnya dan bernuansakan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa, pelaksana pembangunan (aparatur negara) dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.

Implementasi regulasi akselerasi pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan strategi kuota 30 % sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1, masih menemui sejumlah hambatan yang cukup pelik. Hal ini tercermin pada potret keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Kota Semarang yang hanya 11 %. Realitas ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 1999 yang hanya mencapai 5 %. Hambatan yang muncul ternyata tidak hanya secara internal dari politisi perempuan seperti kualitas SDM dan Pengalaman sebagai politisi, tapi juga dari faktor eksternal seperti budaya patriarkhi yang berimplikasi pada rendahnya kuantitas perempuan yang ada di ranah politik. hal ini tercermin pada minimnya jumlah politisi perempuan yang masuk pada elit parpol di setiap tingkatan. Realitas potret keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang juga tidak jauh dari kondisi diatas.

Oleh karenanya pemilu 2009 dibutuhkan komitmen parpol untuk serius dengan upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan memberikan kuota 30 %, baik di struktur parpol maupun di legislatif. Lebih dari itu dibutuhkan penyempurnaan regulasi pada UU RI tahun 2003 no 12 pasal 65 ayat 1 yang dikritik banyak pihak masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak adanya sanksi bagi parpol yang tidak mentaati.

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari Gerakan Massa pro Demokrasi lainnya yang ikut andil dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Berbagai faktor mendorong gerakan meruntuhkan kekuasaan Orde Baru yaitu adanya krisis moneter yang sejak tahun 1997.

Memburuknya ekonomi Indonesia, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela, kemiskinan terus meningkat. Ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya protes dan pembangkangan sosial. Reaksi ketidakpuasan masyarakat ini dijawab dengan tindakan represif seperti penangkapan, penghilangan orang dan penembakan yang mendorong muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa yang kemudian mendapat sokongan penuh dari rakyat termasuk di dalamnya kaum perempuan. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar- besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Merespon situasi di atas, pada tanggal 18 Mei 1998 sekitar 75 orang aktivis perempuan dari seluruh Indonesia termasuk dari Timor Leste berkumpul di Jakarta dan bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang pro pada gerakan perempuan. Dari hasil pertemuan inilah kemudian lahir Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Setelah dua hari berselang, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Pada Anggaran Dasar Koalisi Perempuan Indonesia, bahwa pendirian organisasi Koalisi Perempuan Indonesia merupakan respon kalangan perempuan dalam momentum perlawanan Gerakan Perempuan, Mahasiswa dan Kelompok Pro demokrasi lainnya terhadap rezim otoriter Pemerintahan Orde Baru. Umum diketahui bahwa rezim Orde Baru sudah menghancurkan gerakan perempuan dengan

penyeragaman/penunggalan ideologi dan wacana yang merugikan perempuan serta diskriminasi terhadap perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan sebagai organisasi masa berbasis keanggotaan individu dalam Kongres Nasionalnya Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Kamis, 17-18 Desember 1998. Pemilihan tempat, di Yogyakarta dan pilihan tanggal dan bulan berdekatan dengan peringatan 22 Desember, dimaksudkan untuk menegaskan kembali tonggak pergerakan perempuan Indonesia yang telah dimulai sejak 22 Desember 1928, yang selanjutnya disebut Hari Ibu dan diubah sebagai Hari Pergerakan Perempuan. Sejak Tahun 1999 hingga 2001, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan Kongres

Wilayah untuk pendirian Koalisi Perempuan di tingkat propinsi, antara lain Kongres Wilayah : Jabodetabek, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pendirian Koalisi perempuan tingkat Wilayah ini, diharapkan pengurus wilayah kemudian membentuk cabang - cabang.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program – program apa saja yang dilakukan KPI di kota Semarang untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh KPI Kota Semarang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif, dikarenakan penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Peneliti berupaya untuk menggambarkan secara kualitatif peran LSM KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI) Semarang dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik berupa kata-kata atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

Informan penelitian adalah orang yang langsung berkecimpung ( pengurus ) di LSM KPI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data naratif dan deskriptif. Yaitu berupa teks, kata-kata tertulis, dan tindakan-tindakan yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam tempat penelitian.

## **Profil KPI**

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari Gerakan Massa pro Demokrasi lainnya yang ikut andil dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Berbagai faktor mendorong gerakan meruntuhkan kekuasaan Orde Baru yaitu adanya krisis moneter yang sejak tahun 1997.

Memburuknya ekonomi Indonesia, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela, kemiskinan terus meningkat. Ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya protes dan pembangkangan sosial. Reaksi ketidakpuasan masyarakat ini dijawab dengan tindakan represif seperti penangkapan, penghilangan orang dan penembakan yang mendorong muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa yang kemudian mendapat sokongan penuh dari rakyat termasuk di dalamnya kaum perempuan. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Merespon situasi di atas, pada tanggal 18 Mei 1998 sekitar 75 orang aktivis perempuan dari seluruh Indonesia termasuk dari Timor Leste berkumpul di Jakarta dan bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang pro pada gerakan perempuan. Dari hasil pertemuan inilah kemudian lahir Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Setelah dua hari berselang, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.<sup>6</sup>

Adapun visi dan misi KPI itu sendiri adalah sebagai berikut:

### **VISI DAN MISI KPI**

#### **a. Visi**

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

#### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi menjadi:

1. Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan,
2. Kelompok pendukung sesama perempuan,
3. Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan,
4. Pemberdaya hak politik perempuan.
5. Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan,

---

<sup>6</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik ORDE Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

6. Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Asas organisasi Koalisi Perempuan Indonesia adalah untuk mendukung demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan Feminisme sebagai landasannya. Asas pada kesetaraan dan keadilan jender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan jender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural. Tujuan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia memiliki untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya serta Lingkungan Hidup.

Program KPI dalam pemberdayaan dapat dibagi dalam kelompok - kelompok kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Motivasi**

Sebagai langkah awal didalam proses penggerakan Koalisi Perempuan Indonesia untuk mendorong terbentuknya pemberdayaan perempuan yang mandiri dan bermartabat adalah kemampuan memberikan pemahaman tentang pemberdayaan dan kegiatan- kegiatan pergerakan perempuan dalam memberikan motivasi kepada perempuan.

#### **b. Penyuluhan.**

Proses komunikasi yang dilakukan oleh fungsionaris/ anggota KPI dalam rangka memberikan pengetahuan tentang program pemberdayaan perempuan dilakukan melalui proses penyuluhan kepada para perempuan, remaja perempuan dan sasaran lainnya (PKK, orangtua, lansia, dll) baik melalui kegiatan kunjungan rumah, pertemuan perorangan maupun pertemuan kelompok. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para penggerak KPI sebagai fungsional untuk memperoleh angka kreditnya.

#### **c. Bimbingan dan Konseling**

Dengan adanya konseling merupakan kegiatan strategis dalam membantu klien agar dapat dengan mantap membuat keputusan sendiri untuk mengikuti Program pemberdayaan perempuan serta untuk saling membantu. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah- masalah yang ada didalam masyarakat, khususnya dalam kesewenang-wenang terhadap perempuan. Upaya konseling yang dilakukan kepada masyarakat agar mampu bangkit dan tidak bergantung kepada laki-laki.

#### **d. Advokasi**

Sasaran dari advokasi ini adalah pembuat atau penentu kebijakan atau kepentingan publik dan tokoh yang berpengaruh mulai dari tingkat kota sampai di tingkat lini lapangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh baik tokoh formal maupun non formal. Di tingkat lini lapangan sasaran tokoh formal tersebut antara lain seperti: Camat; Lurah; Ka LSM dan sebagainya, sedangkan tokoh informal antara lain seperti: PKK kecamatan/kelurahan; RT/RW, Tokoh agama.

Atas dasar itu, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan secara nyata yang dilaksanakan adalah :

### **1. Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Umum Dalam Menyambut PEMILU Untuk Memilih Calon Anggota Legislatif**

KPI juga memiliki kegiatan sosialisasi pendidikan politik terhadap masyarakat perempuan. kegiatan tersebut adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan KPI kota Semarang menjelang Pemilu 2009-2014. Melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini diharapkan memperoleh seperangkat proses pendewasaan hidup bagi perempuan dalam bermasyarakat, pengambilan keputusan, dan keterlibatan perempuan dalam mengikuti kebijakan publik melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap dalam mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan bersama dalam reasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan politik tidak hanya mengenalkan calon-calon anggota legislative yang akan bertarung dalam Pemilu. Namun, pendidikan ini juga mengajak masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan aspirasi untuk calon-calon legislative yang terpilih nantinya. Pernyataan ini dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada seorang anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014 yang juga sebagai pembicara pada waktu lalu.

### **2. Melatih anggota KPI Kota Semarang dalam mengelola kepengurusan organisasi secara demokratis**

Melibatkan perempuan dalam kepengurusan secara demokratis mengandung pengertian bahwa keseluruhan jabatan kepengurusan yang ada dalam KPI murni dipegang oleh perempuan, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat rumah tangga. Organisasi ini diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri melalui musyawarah mufakat dan pemungutan suara. Pihak luar organisasi tidak diperkenankan untuk mencampuri masalah *intern* organisasi selama organisasi yang bersangkutan mampu memilih dan menyelesaikan sendiri. Pihak luar hanya perlu memberi *support* kepada organisasi perempuan untuk bisa eksis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang bersifat politis.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPI kota Semarang dikarenakan oleh realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang masih relatif rendah. Realitas tersebut secara tidak langsung telah “merugikan” perempuan. Padahal, sesungguhnya keterwakilan politik perempuan sangat berarti karena beberapa argumen. Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Dan keempat, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Selain harus terwakili kepentingannya, perempuan juga harus terlibat dalam politik karena adanya faktor-faktor yang saling berkaitan.

Setiap organisasi kemasyarakatan yang terbentuk oleh kesukarelawan dari anggota pasti memiliki masalah dan tantangan tertentu dalam setiap kegiatan yang diadakan. Tantangan tersebut harus dilalui seiring untuk membangun organisasi tersebut agar dikenal oleh banyak masyarakat. Permasalahan permasalahan tersebutlah yang akan menjadikan organisasi itu menjadi bijak dan adil untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapi. Permasalahan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan program-program yang telah dibentuk dan disusun sebagai rancangan program tahunan. Permasalahan tersebut juga dialami organisasi perempuan seperti, Koalisi Perempuan Indonesia. Penghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Semarang itu muncul dikarenakan beberapa faktor, seperti:

#### 1. faktor Internal

##### a. Struktur Kepemimpinan

Permasalahan internal muncul ketika pemilihan Sekjen ataupun sekretaris wilayah dan cabang. Faktor ketidaksesuaian antara yang diinginkan anggota dan forum untuk penentuan seorang ketua dalam organisasi tersebut. Faktor tersebut juga mampu memecah belah sebuah kepemimpinan KPI untuk masa periode kepemimpinan.

##### b. Pengambilan Kebijakan

Pengambilan kebijakan /rancangan program kerja yang telah disusun tidak disetujui oleh beberapa pihak, sehingga pengambilan kebijakan tersebut harus ditunda untuk mencapai kesepakatan antar anggota.

##### c. Keuangan

Keuangan mempunyai peran penting dari terbentuk dan berlangsungnya sebuah kegiatan yang dirancang oleh KPI ataupun Organisasi lainnya, apabila sebuah organisasi memiliki keuangan yang minim dan minus, maka organisasi tidak akan mampu melaksanakan kegiatan dan juga bisa dipastikan akan bubar.

## 2. faktor eksternal

- a. **Budaya Patriarkhi**  
Budaya politik patriarkhi yang masih sangat dominan dengan pandangan yang sulit untuk merubahnya bahwa bergabung dengan organisasi adalah ranah publik dan tidak cukup banyak perempuan untuk dapat mempunyai potensi yang cukup andal untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan dirinya dalam budaya organisasi dan politik yang semakin kompetitif.
- b. **Rendahnya Minat**  
Rendahannya kemauan berorganisasi dan berpolitik dari perempuan untuk dapat memperjuangkan dirinya setara dengan laki-laki sehingga dapat bahu membahu walaupun sudah dijamin secara tegas dalam perubahan peraturan perundang-undangan.
- c. **Masih rumitnya Sistem Organisasi**  
Pada umumnya partai politik peserta pemilu belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatisan yang cukup besar dari masyarakat atau pemilih bagi kemenangan partai politik pada setiap pemilu.
- d. **Belum adanya kesadaran Masyarakat**  
Belum tersusunnya modul pendidikan tentang organisasi dan politik yang mengandung muatan atau substansi berdasarkan prinsip perpektif gender secara nasional maupun substansi gender secara regional, internasional atau global.
- e. **Lemahnya komunikasi**  
Masih lemahnya kinerja dan jalinan jaringan kerja (networking) diantara institusi perempuan yang telah ada dalam mengupayakan peningkatan peran perempuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- f. **Tidak ada dukungan dari pemerintah**  
Belum terbangunnya jalinan mata rantai yang komunikatif dalam bentuk jaringan kerja (networking) antar institusi perempuan baik antar pemerintah, pusat, daerah dan masyarakat serta pers atau media untuk menghimpun kekuatan.

## **Kesimpulan**

Peran Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Semarang secara keseluruhan masih terbilang kurang. Peran mereka belum bisa mendominasi maupun setara dengan peran laki-laki. Peran KPI Kota Semarang untuk membuat kemandirian perempuan masih belum bisa menonjol dikarenakan kurang aktifnya KPI mensosialisaikan kegiatannya, terutama pada bidang politik. Kurang berkembangnya KPI wilayah Semarang juga dikarenakan banyaknya perempuan kota Semarang yang tidak peduli dan tidak ingin bergabung ke KPI.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan fakta bahwa kegiatan tentang pemberdayaan perempuan dalam dunia politik sangatlah minim. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan KPI Kota Semarang terkait pemberdayaan perempuan dalam bidang politik kurang berhasil dikarenakan kurang adanya partisipasi dari para perempuan Kota Semarang yang tertarik dalam dunia politik serta untuk menjadi anggota legislatif. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi tentang pemberdayaan politik untuk perempuan Semarang masih bersifat pasif. Hal ini diperkuat atas hasil wawancara yang menyatakan bahwa dalam setiap rapat dan sosialisasi perempuan hanya sekedar hadir dan mendengarkan jalannya kegiatan. Mereka tidak berani mengusulkan pendapat ataupun menentang kebijakan yang telah dikeluarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adian, Donny, Gahra, 2006. *Demokrasi kami*, Depok : Koekoesan.
- Bramantyo, dkk. *Demokrasi dan Civil Society, Institut for Research and Empowerment*, Yogyakarta,2003,hlm.8.
- BPS, 2010, Provinsi Jawa Tengah. Sensus Penduduk Kota Semarang Tahun.
- BP3AKB, 2013. Provinsi Jawa Tengah.
- Budiarjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta* : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Budairi, Muhammad, 2002. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, Jakarta: E-law Indonesia, 2002.
- Bramantyo, dkk, 2003. *Demokrasi dan Civil Society, Institut for Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Dinas Tata Ruang Cipta Karya Daerah Kota Semarang. 2012
- Fakih, Mansoer, 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Catatan Atas Gagalnya Politik ORDE Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad AS, 1996, *Demokrasi dan Civil society*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global : Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- KPU Kota Semarang dan Provinsi Jawa tengah. Hasil Pemilu tahun 2009 dan 2014.
- Koalisi Perempuan Indonesia dan Sejarahnya, 2012. Buku Saku KPI.

- Koderi, Muhammad, 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta : Gema Insani,
- Lazarusli, Budi, 2006. *Etika Politik dan Demokrasi: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Salatiga : Percik.
- Lexy J, Moelong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mosse, Julia Cleves. 1993. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Patilima, Hamid, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA.
- Pramudianto, *Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jurnal Madani vol.2 No. 3 tahun 1999, hlm.18.
- Qasim ja'far, Muhammad, 2001. *Anas mengembalikan hak-hak politik perempuan sebuah perspektif islam*, Jakarta : penerbit azan.
- Soetjipto, Widyani, Ani, 2010. *Politik perempuan bukan gerhana*, Jakarta: KOMPAS.
- Setiawan, Bonnie. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil : Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia*, Jakarta: INFID, 2000, hlm. 72.
- Setiawan, Bonny, 2013. *LSM Kekuatan Baru* ,
- Suwondo, Kutut. *Civil Society di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*, Jakarta, Pustaka Percik, hlm.15.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Siti Musdah, Mulia dan Anik farida, 2007. *Perempuan dan Politik*, Jakarta :  
Gramedia Pustaka Utama,

Soekanto, Soerjono, 1991. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada.

Suharko, 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan  
Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara  
Kencana, 2005, hlm. 127.

Tari, Siwi Utami, 2001. *Perempuan Politik di Parlemen*, Yogyakarta : Gama  
Media.

Utami, Tari. Siwi, 2001. *Perempuan Politik di Parlemen*, Yogyakarta : Gama  
Media.

Wawancara dengan Fungsiaris KPI Kota Semarang. Ibu Dian Hastuti Wardani.  
Tanggal 25 Januari 2015